



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD FAISHAL AMINUDDIN
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 832560

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.120.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m<sup>2</sup>/180 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 1250 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LAMONGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m<sup>2</sup>/153 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
6. Tanah Seluas 1050 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KEDIRI, WARISAN Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 144.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 250.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.514.000.000



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.514.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.